

APBD Perubahan 2025 Kukar Disahkan Tak Ada Proyek Infrastruktur Baru



Sumber : TRIBUN KALTIM Kamis, 02/10/2025

Tenggarong, TRIBUN – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten Kukar pada Selasa (30/9/2025) malam di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar.

Sebelumnya, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) telah menuntaskan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam laporan Banggar, pendapatan daerah 2025 turun dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,1 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap berada di angka Rp953 miliar.

Seiring dengan itu, belanja daerah disesuaikan dari Rp12 triliun menjadi Rp11,35 triliun, dengan penyesuaian terbesar pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan netto juga turun dari Rp 500 miliar menjadi Rp165,9 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.

Seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 dengan sejumlah catatan. PDIP menekankan pentingnya peningkatan PAD, Golkar mengarahkan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sementara Gerindra mendorong optimalisasi serapan anggaran serta validasi data pajak daerah. PAN

mengingatkan agar aspirasi masyarakat tetap diperhatikan, Nasdem menekankan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta PKB dan PKS meminta penganggaran dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

DPRD menegaskan, pengesahan APBD Perubahan 2025 merupakan langkah adaptif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sesuai kondisi keuangan terkini. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyampaikan bahwa perubahan APBD kali ini tidak menambah agenda infrastruktur baru. Seluruh penyesuaian disebutkan hanya berupa pergeseran anggaran. “Jadi di perubahan tidak ada penambahan agenda kegiatan infrastruktur yang baru. Semuanya cuma pergeseran,” ujarnya.

Rendi menambahkan, salah satu program yang segera direalisasikan setelah pengesahan adalah pencairan beasiswa. Sekitar 4.000 mahasiswa Kukar dipastikan akan segera menerima bantuan tersebut setelah terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Untuk saya sendiri, beasiswa cair. Karena setelah disahkan perubahan ini oleh teman-teman DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kita tunggu DPA-nya dan dana yang ditunggu oleh mahasiswa kita kurang lebih 4.000 orang di Kutai Kartanegara itu bisa dicairkan,” jelasnya.

Ia memastikan, secara garis besar, perubahan APBD 2025 hanya bersifat teknis. Semua kegiatan yang dianggarkan dalam APBD murni tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Pastinya di perubahan ini tidak ada hal yang baru, semua yang sudah dianggarkan di murni itu yang tetap dijalankan di perubahan. Paling ada pergeseran beberapa kegiatan tapi tidak merubah substansi dari kegiatan itu sendiri,” pungkas Rendi. **(pvs)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, APBD Perubahan 2025 Kukar Disahkan Tak Ada Proyek Infrastruktur Baru, 02/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam Pasal 316 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 3. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.